

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri (Vidhandika. 2006)

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya kelautan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dibeberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakat bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial.

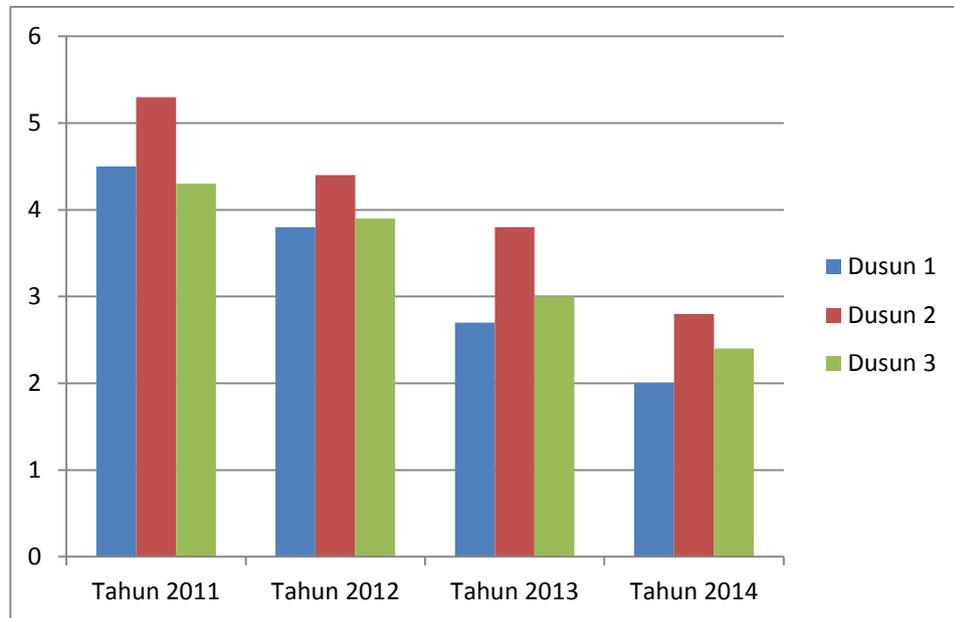
Pendapatan yang diterima masyarakat pesisir mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatannya. Dengan demikian pendapatan yang diterima masyarakat pesisir akan dialokasikan kepada berbagai kebutuhan dengan cara inilah yang menentukan tingkat kehidupan masyarakat pesisir

Sesuai Undang-undang sistem“ Pemberdayaan Perempuan” Nomor 18 tahun 2014: Setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan atas hak dasarnya kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Dari bunyi Undang-undang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mencapai kesejahteraan hidupnya.

Proses pemberdayaan yang seakan-akan hanya memprioritaskan laki-laki untuk aktif dalam program pemberdayaan di berbagai sektor. Perempuan hanyalah kelompok yang hanya menerima hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kondisi seperti ini bukanlah kondisi yang ideal untuk mewujudkan program pembangunan yang optimal. Karena pada dasarnya perempuan pun mempunyai banyak potensi yang perlu dikembangkan.

Pada hakikatnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa adalah upaya peningkatan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan mental dan spiritual perempuan sebagai tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hakikatnya perempuan adalah sumber daya insani yang memiliki potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional (Ahmad, Syamsiah. 2005). Perempuan merupakan suatu potensi, dimana saat ini dalam persaingan global yang semakin menguat dan ketat, maka program pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dimasa yang akan datang. Posisi perempuan yang selama ini cenderung diletakkan lebih rendah daripada laki-laki, menyebabkan kemampuan perempuan untuk berkontribusi dan mengembangkan potensi tidak maksimal (Abdullah Irwan. 2006).

Grafik 1.1: Data penduduk miskin



Keterangan:

Pertahun	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
Tahun 2011	4,5 %	5,3 %	4,3 %
Tahun 2012	3,8 %	4,4 %	3,9 %
Tahun 2013	2,7 %	3,8 %	3 %
Tahun 2014	2 %	2,8 %	2,4 %

Menurut Mosse, JC. 2007. Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan domestik, hal itu disebabkan karena perbedaan gender yang masih begitu kuat di dunia kerja, sehingga budaya patriarki amat kuat di dalamnya. Pembagian kerja seperti ini telah berdampak pada peran produktif perempuan. Mereka dianggap sebagai pekerja cadangan dan pekerja kedua, sehingga gajinya pun dibayar lebih murah. Perempuan masyarakat nelayan pada umumnya bekerja sebagai pengasuh anak, mengolah dan menjual hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari suaminya. Selain itu, mereka sering membentuk

kelompok-kelompok arisan. Namun, kegiatan yang mereka lakukan tidak dapat mengubah status keluarga dan posisi mereka sebagai komunitas yang selalu berhadapan dengan permasalahan hidup yang semakin kompleks..

Keterbatasan ekonomi keluarga yang menuntut perempuan pesisir untuk bekerja. Perempuan yang sudah berumah tangga, apalagi yang sudah memiliki putra, tidak jarang mengalami dilema dalam memenuhi tuntutan pekerjaan di luar rumahnya. Dilema ini terjadi karena kenyataannya dunia ini masih dikuasai oleh laki-laki, bukan saja di Indonesia, tetapi juga negara dan di berbagai kalangan pemerintahan. Keadaan ini menyebabkan kalangan laki-laki merasa diuntungkan, sehingga tidak mengherankan apabila mereka mencoba mempertahankan status tersebut. Meskipun perempuan telah menunjukkan tanggung jawab, jam kerja dan tingkat pendidikan dalam jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki, tetapi tidak sedikit contoh-contoh yang ada menunjukkan bahwa pekerjaan wanita menerima upah dan penghargaan lebih rendah dari pekerjaan laki-laki. Penyebab lain dari kodrat tersebut adalah kodrat wanita itu sendiri yang memiliki kondisi biologis, yaitu mengandung, melahirkan dan memiliki naluri merawat yang lebih tinggi dari suaminya (Semiawan, 2002).

Perempuan dalam pekerjaan mencari nafkah tidak berarti mereka melepaskan diri dari tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, jumlah curahan waktu dalam kegiatan rumah tangga pada umumnya lebih tinggi, keadaan ini terjadi karena perempuan sebagai penanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga membutuhkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan memasak, membersihkan rumah, mencuci, mengasuh anak dilaksanakan sebelum mereka terjun mencari nafkah.

Salah satunya adalah pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang terletak di Desa Pasalae kecamatan Gentuma Raya merupakan daerah yang letaknya berada di pesisir laut Gorontalo utara dan rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai nelayan sedangkan perempuan yang berada disekitar kawasan tersebut berfungsi sebagai perempuan rumah tangga serta membantu suami mencari nafkah sehingga dapat menambah pendapatan suami. Hal ini dilakukan karena pendapatan sang suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tabel 1.1: Jumlah penduduk Desa Pasalae Tahun 2014

No	Jenis Kelamin	Dusun I		Dusun II		Dusun III	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Laki-laki	233	50,4%	215	49,5%	248	50,2%
2	Perempuan	230	49,6%	219	50,5%	247	49,8%
Jumlah		461	100%	434	100%	495	100%

Tabel 1.2: Jenis pekerjaan Tahun 2014

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Keterangan
		Jlh	%	Jlh	%	
1	PNS	41	5,9%	36	5,1%	
2	TNI/Polri	15	2%	1	0,1%	
3	Buruh	34	4,8%	-	-	
4	Nelayan	63	9%	50	7,1%	
5	Wiraswasta	143	20,6%	104	14,9%	
6	Petani	26	3,7%	19	3%	
7	Dan lain-lain	372	54%	486	69,8%	
Jumlah		694	100%	696	100%	

Berdasarkan pada uraian di atas kajian pemberdayaan perempuan sebagai jawaban dari permasalahan subordinasi perempuan dalam pembangunan. Kaum perempuan merupakan sumber daya manusia yang juga harus dikembangkan potensinya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh manakah pemberdayaan perempuan pesisir tersebut berjalan? Pertanyaan ini lah yang mendasari peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul **“Profil Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Desa Pasalae”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perempuan pesisir belum memiliki pemahaman tentang pembagian waktu kerja dengan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga
2. Kegiatan yang lebih potensial dalam masyarakat pesisir khususnya perempuan tidak diperhatikan dengan baik
3. Perempuan pesisir belum dapat mengidentifikasi keterampilan usaha yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana profil pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pasalae Kecamatan. Gentuma Raya Kabupaten. Gorontalo Utara?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pasalae Kecamatan. Gentuma Raya Kabupaten. Gorontalo Utara?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberi kontribusi keilmuan tentang teori pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dipesisir sebagai salah satu ruang lingkup kajian pengembangan program PLS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis sebagai masukan dan saran bagi masyarakat dan stakeholders untuk peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan di daerah pesisir khususnya.